

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Saebani, Beni, 2008, *Metode Penelitian*, Pustaka Setia, Bandung.
- Ashshofa, Burhan, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- El Muhtaj, Majda, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hanityo, Sumitro Ronny, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hariwijaya, M dan M. Djaelani, 2004, *Teknik Menulis Skripsi dan Tesis*, Zenith Publisher, Yogyakarta.
- H. Manulung, Sendjun, 1990, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Husni, Lalu, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kartasapoetra "et all", 1986, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Riyadi, Eko, dkk, 2012, *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta.
- Rusli, Hardijan, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan 2003*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soejono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mammudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*:

Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Syamsudin, M, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang Peraturan Pengawasan Perburuhan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan di seluruh Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO

Nomor 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On*

The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

C. Penelitian

Hakim, In Rochania, “Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan terhadap

Pemenuhan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Perusahaan Sarung Tangan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013.

Pebriana, Lastika “Peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Yogyakarta Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Terhadap Pemberian Kesempatan Kerja Bagi Pekerja Penyandang Cacat Di Hotel Grand Quality Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.

Priyohito, Mikael Haryo, “Aksesibilitas Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Pada Perusahaan Bidang Perhotelan Di Kota Yogyakarta”, *Tesis*, Magister Ilmu Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016.

D. Internet

Data Jumlah Perusahaan di DIY Tahun 2017
http://nakertrans.jogjaprovo.go.id/home/c_home, diakses 14 Desember 2017, pukul 13.10 WIB.

Fajri Nursyamsi [et.al.], Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju

Indonesia Ramah Disabilitas, <http://www.pshk.or.id/wp-content/uploads/2016/01/Kerangka-Hukum-Disabilitas-di-Indonesia.pdf>, diakses 19 Oktober 2017, pukul 20.00 WIB.

<https://ridhamujahidahulumuddin.wordpress.com/2016/02/16/materi-hukum-ham-hak-asasi-manusia/>, diakses 19 Oktober 2017, pukul 08.20 WIB.

Marjuki, “Penyandang Cacat Berdasarkan Klasifikasi International Classification of Functioning for Disability and Health (ICF)”, <https://www.scribd.com/doc/24613087/Penyandang-Cacat-Berdasarkan-Klasifikasi-International-Classification-of-Functioning-for-Disability-and-Health-ICF>, diakses 12 April 2017, pukul 03.15 WIB.

Sulistiyo, “Peran Pemerintah DIY Dalam Penyusunan Perda Perlindungan & Hak-Hak Penyandang Disabilitas”, <http://www.jimlyschool.com/read/news/330/peran-pemerintah-diy-m-penyusunan-perda-perlindungan-pemenuhan-hakhak-penyandang-disabilitas/>, diakses 4 April 2017, pukul 04.21 WIB.